

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Implementasi Kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang dinilai masih kurang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Adanya beberapa isi dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di SMP PGRI 2 Kota Semarang, adalah peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana.

SMP PGRI 2 Kota Semarang dengan permasalahan yang ada dapat disimpulkan bahwa SMP PGRI 2 Kota Semarang tetap melakukan pelayanan pendidikan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, karena pelayanan pendidikan penting dilakukan agar masyarakat di sekitar SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki paradigma mengenai pentingnya pendidikan untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan.

Implementasi isi kebijakan dilihat dari sisi peserta didik dinilai kurang sesuai karena peserta didik di SMP PGRI 2 Kota Semarang berjumlah 20 siswa/sekolah, sedangkan menurut kebijakan SPM Pendidikan Dasar minimal 22 siswa per kelas maksimal 32 siswa per kelas. Isi kebijakan dari sisi tenaga pendidik dinilai kurang sesuai karena masih ada yang belum mendapatkan sertifikat pendidikan dan masih terdapat yang berkualifikasi D1. Isi kebijakan dilihat dari sisi sarana prasarana dinilai kurang sesuai, karena SMP PGRI 2 Kota

Semarang tidak memiliki Laboratorium IPA, Perpustakaan, UKS, memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi, dan gedung yang sering tergenang air rob banjir.

Implementasi isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang dinilai yang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Adanya beberapa isi dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang yang sesuai dengan pelaksanaannya di SMP PGRI 2 Kota Semarang, adalah kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, manajemen sekolah, dan penilaian pendidikan.

Implementasi isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dilihat dari kurikulum dinilai sudah sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, karena SMP PGRI 2 Kota Semarang menggunakan kurikulum KTSP dari tahun 2006-sekarang. Isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dilihat dari penjaminan mutu pendidikan dinilai sudah sesuai, karena Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Pengawas UPTD melakukan supervisi ke satuan pendidikan, SMP PGRI 2 Kota Semarang memberikan laporan hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas serta ujian akhir kepada orang tua peserta didik. Isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dilihat dari manajemen sekolah dinilai sudah sesuai karena SMP PGRI 2 Kota Semarang sudah menggunakan MBS. Isi kebijakan SPM Pendidikan Dasar dilihat dari penilaian pendidikan dinilai sudah sesuai karena SMP PGRI 2 Kota Semarang memiliki program untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

5.1.2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar dinilai masih kurang sesuai.

Adanya beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan SPM Pendidikan Dasar adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Faktor komunikasi dinilai masih kurang efektif karena Dinas Pendidikan Kota Semarang kurang dalam melaksanakan sosialisasi mengenai SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang, dapat dilihat dari guru dan kepala sekolah yang belum memahami dari tujuan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Faktor sumberdaya dinilai masih kurang baik karena SMP PGRI 2 Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang belum dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya berupa fasilitas dana yang habis dikeluarkan oleh SMP PGRI 2 Kota Semarang untuk biaya operasional meninggikan gedung dari rob banjir. Faktor disposisi dinilai kurang baik, karena adanya sikap kecenderungan yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dan insentif mempengaruhi kinerja dari tenaga pendidik di SMP PGRI 2 Kota Semarang. Faktor struktur birokrasi dinilai masih kurang sesuai karena SMP PGRI 2 Kota Semarang tidak melakukan kerja sama dengan pihak luar.

5.2. Saran

Saran yang diberikan terhadap penelitian mengenai implementasi Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang yaitu mengadakan promosi ke SD mengenai pelayanan pendidikan yang diberikan SMP PGRI 2 Kota Semarang. melakukan rekrutmen tenaga pendidik lebih selektif dan kualifikasinya minimal S1, untuk tenaga pendidik yang kualifikasi D1 diberikan kelonggaran untuk dapat

melanjutkan kuliah S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Tenaga pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi pendidikan dapat mengajar di sekolah lain agar memenuhi jam tatap muka sesuai kebijakan yang sudah ada. SMP PGRI 2 Kota Semarang melakukan renovasi ruangan yang terkena genangan air rob banjir sehingga dapat dimanfaatkan untuk ruang Laboratorium IPA, UKS, dan Perpustakaan agar peserta didik SMP PGRI 2 Kota Semarang mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar dan dapat menunjang prestasi peserta didik agar memiliki *soft skill* yang lebih baik.

Saran yang diberikan terhadap penelitian mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan Dasar di SMP PGRI 2 Kota Semarang adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Permendiknas No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar secara intensitas terutama kepada satuan pendidikan yang mendapatkan akreditasi C di Kota Semarang. Sosialisai ini bertujuan agar satuan pendidikan khususnya SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat melaksanakan pelayanan pendidikan yang dapat sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan penambahan jumlah staf dibidang Dikdasmen dalam penanganan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Pemerintah membuat kebijakan secara khusus untuk menutup satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar, sehingga Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat memiliki kewenangan yang mutlak. Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat memberikan bantuan finansial kepada satuan pendidikan yang tidak sesuai kebijakan SPM Pendidikan Dasar bantuan bukan hanya dari BOS tetapi ada bantuan khusus untuk sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan dan layak untuk diberikan bantuan dana. Pemerintah agar mempunyai kebijakan khusus untuk menutup satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Dinas Pendidikan Kota Semarang pemberian insentif

kepada tenaga pendidik sudah diberikan melalui sertifikasi guru. Pemberian insentif tidak menjamin kinerja guru menjadi lebih baik, seharusnya tenaga pendidik dengan adanya atau tidak adanya insentif tidak mempengaruhi kinerja, karena memang sudah menjadi kewajiban sebagai guru untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya dengan tupoksi yang sama. SMP PGRI 2 Kota Semarang bisa melakukan kerjasama dengan media massa untuk dapat memberikan informasi mengenai pelayanan pendidikan di SMP PGRI 2 Kota Semarang kepada masyarakat di Kota Semarang tujuannya agar banyak orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya untuk sekolah di SMP PGRI 2 Kota Semarang, dan SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat bekerja sama dengan perusahaan dalam membantu memperbaiki sarana prasana yang setiap dua tahun terkena genangan air rob banjir, sehingga situasi dan kondisi di SMP PGRI 2 Kota Semarang dapat sesuai dengan kebijakan SPM Pendidikan Dasar.